

# PETUNJUK TEKNIS PENUMBUHAN KELEMBAGAAN AGRIBISNIS INDUSTRIAL PEDESAAN (AIP)



PRIMA TANI DESA SEMIN KECAMATAN SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN YOGYAKARTA  
2007



**PETUNJUK TEKNIS  
PENUMBUHAN KELEMBAGAAN  
AGRIBISNIS INDUSTRIAL  
PEDESAAN (AIP)**



PRIMATANI DESA SEMIN KECAMATAN SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN YOGYAKARTA  
2007



## KATA PENGANTAR

Benih memiliki peran strategis sebagai sarana pembawa teknologi baru, berupa keunggulan yang dimiliki varietas dengan berbagai spesifikasi keunggulan yaitu daya hasil tinggi, tahan terhadap hama dan penyakit yang mendukung system pola tanam dan program pengendalian hama terpadu, umur genjah untuk meningkatkan indeks pertanaman, dan keunggulan mutu hasil panen sehingga sesuai dengan selera konsumen. Benih bermutu tinggi memberikan manfaat teknis dan ekonomis yang banyak bagi perkembangan suatu usaha pertanian.

Program peningkatan ketahanan pangan nasional memerlukan dukungan sub sistem (kelembagaan) sarana produksi, diantaranya adalah kelembagaan perbenihan.

Brosur ini membahas tentang kelembagaan perbenihan khususnya untuk komoditas tanaman pangan dan hortikultura. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada tim penulis yang telah menyusun brosur/tulisan ini.

Yogyakarta Desember 2007

Penyusun.

## DAFTAR ISI

Bab	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan .....	1
II. PETUNJUK DAN PRINSISP PENUMBUHAN KELEMBAGAAN .....	3
2.1 Petunjuk Penumbuhan Kelembagaan .....	3
2.2 Prinsip Dasar Penumbuhan Kelembagaan .....	3
III. LANGKAH STRATEGIS PERUMUSAN KELEMBAGAAN INTRODUKSI..	6
3.1 Identifikasi Jenis Aktivitas .....	6
3.2 Pemahaman Kinerja Interaksi.....	6
3.3 Pemahaman Tingkat Komunalitas Masyarakat .....	8
3.4 Perumusan Antisipasi Kelembagaan Introduksi .....	10
IV. PENUMBUHAN KELEMBAGAAN AIP.....	17
4.1 AIP Sebagai Model Inovasi Kelembagaan.....	17
4.2 Pengembangan Elemen Kelembagaan AIP.....	17
4.3 Keterkaitan Antar Elemen Kelembagaan AIP .....	21
4.4 Tolok Ukur Keberhasilan.....	23
4.5 Organisasi Pendampingan.....	24
V PENUTUP.....	27

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Prima Tani terdiri atas dua dimensi pokok yaitu "inovasi teknologi" dan "inovasi kelembagaan". Inovasi teknologi adalah rumusan paket teknologi fisik yang diharapkan mampu mengatasi timpang produktivitas (*yield gap*), sehingga diperoleh produktivitas maksimal dan berkelanjutan sesuai dengan potensi sumberdaya alam (lahan). Inovasi teknologi dinilai penting (*necessary condition*), tetapi belum cukup untuk menghantarkan petani dalam peningkatan produksi dan pendapatan usahatani. Syarat kecukupan (*sufficiency condition*) dalam pengembangan agribisnis adalah inovasi kelembagaan yang mencakup semua elemen agribisnis dan keterkaitannya serta kebijakan pendukung pengembangan. Inovasi kelembagaan dibutuhkan untuk menghantarkan inovasi teknologi dalam peningkatan produksi dan pendapatan petani secara maksimal dan berkelanjutan. Seperti halnya inovasi teknologi, dalam perumusan inovasi kelembagaan juga dibutuhkan kemampuan untuk melakukan identifikasi dan analisis aspek kelembagaan yang sedang berjalan. Melalui pemahaman yang baik tentang jenis aktivitas yang dilakukan dalam pengembangan agribisnis, kinerja interaksi pelaku, dan keragaan komunalitas masyarakatnya akan dapat dirumuskan opsi solusi kelembagaan yang dibutuhkan. Pemahaman aspek strategis operasional metodologi perumusan inovasi kelembagaan ini dinilai sangat penting dalam perumusan antisipasi kelembagaan introduksi. Pemahaman instrumen analisis kelembagaan ini dinilai penting dalam perumusan inovasi kelembagaan dan pemahaman strategi penumbuhan kelembagaan Agribisnis Industrial Pedesaan (AIP).

## 1.2 Tujuan

1. Memberikan pemahaman tentang prinsip dasar penumbuhan kelembagaan agar dapat merumuskan sifat dan tahapan penumbuhan kelembagaan agribisnis secara efektif dan berdaya guna.
2. Membahas langkah strategis atau metodologis operasional perumusan kelembagaan dengan sasaran dapat melakukan analisis secara memadai dalam rangka perumusan opsi inovasi kelembagaan.

3. Mendeskripsikan strategi penumbuhan kelembagaan AIP yang mencakup pengembangan elemen dan keterkaitan antar elemen kelembagaan AIP.
4. Merumuskan tolok ukur dan organisasi pendampingan penumbuhan AIP yang merupakan suatu model kelembagaan usahatani pertanian sekaligus sebagai model inovasi kelembagaan dalam Prima Tani.

## II. PETUNJUK DAN PRINSIP PENUMBUHAN KELEMBAGAAN

### 2.1 Petunjuk Penumbuhan Kelembagaan

Petunjuk berikut ini perlu dipertimbangkan dalam perencanaan dan penumbuhan kelembagaan Prima Tani:

1. Pahami *setting* masyarakat setempat. Bagaimana level kolektivitas atau individualitas masyarakat setempat? Jika kolektivitasnya tinggi maka individualitasnya rendah, begitu sebaliknya. Pada masyarakat yang kolektivitasnya tinggi, dapat dikembangkan lembaga kredit mikro. Jika sangat individualistis, cukup didorong untuk berhubungan dengan lembaga perbankan komersial.
2. Apa bidang pekerjaan yang dilakukan. Tiap pekerjaan atau aktivitas adalah rangkaian dari interaksi demi interaksi. Pahami bentuk, jenis, sifat, dan motivasi ekonomi yang mewarnai interaksi tersebut. Apakah itu semata-mata interaksi ekonomi, atau masih bercampur dengan motivasi sosial. Interaksi pedagang dengan petani semata-mata hanya motif ekonomi (untung dan efisien), sedangkan interaksi antar petani kelompok tani mungkin masih berupa campuran antara motivasi ekonomi dan sosial.
3. Pelajari kelembagaan yang sudah ada di masyarakat. Apakah untuk aktivitas yang akan dijalankan sudah tersedia kelembagaan yang sesuai? Jika sudah ada, apa masalahnya, apakah masih mungkin dimanfaatkan, atau perlu diganti. Atau, hanya perlu diperkuat saja?
4. Identifikasi dan perumusan pola kelembagaan yang sesuai untuk tiap aktivitas. Apakah lebih cocok yang berpola komunitas, berpola pasar, atau berpola pemerintah dengan basis pelayanan.
5. Pahami antisipasi kekentalan kelembagaan yang sesungguhnya diperlukan. Apakah cukup penguatan *personal relation*, cukup *network* saja, atau harus dibentuk organisasi yang memiliki aturan lebih ketat?

### 2.2 Prinsip Dasar Pengembangan Kelembagaan

Perumusan dan penumbuhan kelembagaan agribisnis juga perlu mempertimbangkan tujuh prinsip dasar, sebagai berikut:

1. Prinsip kebutuhan. Pertanyaan awal dalam perumusan kelembagaan agribisnis adalah: apakah satu atau beberapa elemen lembaga tertentu dibutuhkan secara fungsional?

Misalnya, apakah penumbuhan lembaga pasca panen dan pengolahan hasil diperlukan? Jawaban pertanyaan ini sangat tergantung kepada sifat produk dan ketersediaan pasar komoditas yang dikembangkan. Untuk pengembangan komoditas sayuran penumbuhan lembaga pasca panen sangat dibutuhkan karena Komoditas tersebut cepat busuk sementara konsumen membutuhkan sayuran segar. Tetapi untuk pengembangan ternak lembaga tersebut belum terlalu dibutuhkan.

2. Prinsip efektivitas. Jaringan kelembagaan hanyalah sebuah alat, bukan tujuan. Sebagai alat maka elemen lembaga yang dikembangkan haruslah efektif untuk upaya pencapaian tujuan yang diinginkan.
3. Prinsip efisiensi. Penumbuhan suatu elemen kelembagaan agribisnis membutuhkan dana dan waktu yang tidak sedikit. Oleh karena itu dalam penumbuhan elemen kelembagaan harus dipilih opsi yang paling efisien, yaitu yang relatif paling murah, mudah, dan sederhana namun tetap mampu mendukung pencapaian tujuan.
4. Prinsip fleksibilitas. Kelembagaan yang dikembangkan disesuaikan dengan sumberdaya yang tersedia dan budaya setempat.
5. Prinsip manfaat. Kelembagaan yang dikembangkan adalah yang mampu memberikan manfaat paling besar bagi petani dan masyarakat pedesaan.
6. Prinsip pemerataan. Kelembagaan yang dikembangkan memberikan pembagian benefit (*sharing system*) secara proporsional kepada setiap petani dan pelaku agribisnis lainnya di pedesaan.
7. Prinsip keberlanjutan. Kelembagaan agribisnis yang dikembangkan diharapkan akan terus berjalan meskipun keterlibatan lembaga atau aparat pemerintah dan swasta secara langsung telah berkurang.

Mengacu pada 7 prinsip dasar di atas maka penumbuhan kelembagan agribisnis memiliki 2 sifat, yaitu: (a) Penumbuhan elemen kelembagaan tidak harus sama di setiap lokasi, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan, kapasitas sumberdaya dan budaya setempat; dan (b) Elemen lembaga yang dikembangkan tidak harus

bentukan baru tetapi dapat merupakan pengembangan dari elemen lembaga yang sudah ada.

Pada pelaksanaannya, penumbuhan kelembagaan agribisnis ditempuh melalui tahapan sebagai berikut: (a) Inventarisasi elemen lembaga yang sudah ada; (b) Inventarisasi dan penumbuhan elemen lembaga yang dibutuhkan tetapi belum tersedia; (c) Inventarisasi elemen lembaga yang sudah ada tetapi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberikan dukungan pada peningkatan taraf hidup petani dan masyarakat pedesaan; dan (d) Menumbuhkan keterkaitan yang harmonis secara fungsional dan secara institusional antar elemen kelembagaan agribisnis.

### III. LANGKAH STRATEGIS PERUMUSAN KELEMBAGAAN INTRODUKSI

#### 3.1 Identifikasi Jenis Aktivitas

Inti dari kelembagaan adalah interaksi. Sekelompok interaksi yang berbentuk sama atau sejenis melahirkan bentuk "aktivitas". Aktivitas di Prima Tani dapat dibedakan minimal menjadi enam kelompok yaitu:

1. Pemenuhan teknologi dalam bentuk ilmu pengetahuan dan keterampilan, dan bukan dalam bentuk barang.
2. Pemenuhan input atau sarana produksi berupa benih, bibit, pupuk, obat-obatan, alat-alat dan mesin pertanian.
3. Pemenuhan modal usaha baik untuk modal kerja maupun untuk kebutuhan investasi.
4. Pemenuhan tenaga kerja untuk menangani kegiatan pengolahan lahan, pemeliharaan, panen/pasca panen, dan pemasaran hasil.
5. Manajemen usahatani di sawah, ladang, kandang dan kolam berkaitan dengan pengelolaan usaha pertanian.
6. Pemasaran hasil produksi yang mencakup penelusuran informasi pasar dan penjualan hasil di dalam atau ke luar desa.

Secara ringkas, pelaku agribisnis dapat dikelompokkan menjadi tiga aktor yaitu petani, aparat pemerintah, dan pelaku pasar. Ketiganya sangat berbeda dalam segala hal, mulai dari tata nilainya, sifat pekerjaannya, kulturnya, kelebihan dan keterbatasannya, dan lain-lain. Perpaduan dari ketiga pelaku ini akan melahirkan enam kombinasi yaitu: petani-petani, pemerintah-pemerintah, pasar-pasar, petani-pemerintah, petani-pasar, dan pemerintah-pasar. Namun di Prima Tani kita hanya akan menemukan empat pola yaitu: petanipetani, petani-pemerintah, petani-pasar, dan pemerintah pemerintah.

#### 3.2 Pemahaman Kinerja Interaksi

Dalam karakteristik interaksi, salah satu sifat penting yang perlu diketahui apakah interaksi tersebut merupakan interaksi yang bercirikan relasi ekonomi atau bukan? Dengan kata lain, seberapa tinggi motivasi ekonomi di dalamnya? Pemahaman suatu interaksi apakah bersifat ekonomi atau bukan, tidaklah mudah. Dapat dipastikan sebagian besar aktifitas dalam Prima Tani merupakan aktifitas ekonomi, namun derajat interaksi ekonominya bervariasi dari

kategori rendah sampai tinggi. Interaksi dengan derajat ekonomi yang rendah, dapat dikategorikan mengarah ke sifat sosial. Sebagai ilustrasi, Tabel 1 berikut mengkontraskan interaksi yang berciri sangat sosial dengan interaksi yang berciri sangat ekonomi.

**Tabel 1.** Deskripsi Interaksi Bersifat Sangat Sosial dan Interaksi Bersifat Sangat Ekonomis

Interaksi berciri Sangat Sosial	Interaksi berciri Sangat Ekonomis
1. Tujuan interaksi adalah untuk berbuat baik terhadap orang lain, tanpa mengharap imbalan apapun	1. Tujuannya adalah mendapatkan materi atau keuntungan
2. Merupakan interaksi personal yang melibatkan hubungan batin, perasaan, dan emosi mendalam.	2. Bersifat impersonal, tidak perlu kenal dan dekat
3. Mengenal lawan secara baik ( <i>face to face relation</i> ).	3. Tidak mengenal secara baik
4. <i>Punishment</i> berupa hukuman non-materi, misalnya rasa malu	4. Berupa hukuman materi, misalnya dengan pengurangan upah, gaji, dll
5. Umumnya terjadi pada dua orang yang berada di satu wilayah geografis.	5. Dapat terjadi antar orang yang berjauhan, bahkan tidak bertemu muka
6. Ikatan hutang budi kuat.	6. Tak ada ikatan hutang budi.
7. Bersifat <i>multistranded</i> (satu interaksi untuk banyak tujuan)	7. <i>Monostranded</i> (untuk satu tujuan saja)
8. Umumnya merupakan relasi yang sudah lama, atau sudah kenal lama.	8. Dapat berupa relasi pada dua orang yang baru ketemu.

Tiap kelembagaan umumnya didominasi oleh satu jenis interaksi tertentu. Artinya, dengan mengenal interaksinya berarti kita mengenal kelembagaannya. Berpedoman kepada Tabel 1 di atas, berikut diurutkan berbagai kelembagaan yang di dalamnya terdapat interaksi-interaksi yang paling berciri sosial menuju yang paling ekonomi secara berturut-turut, yaitu :

1. Interaksi dalam kelembagaan keluarga atau rumah tangga.

2. Kelembagaan keagamaan, misalnya kelompok pengajian.
3. Kelembagaan arisan kerja. Di sini tenaga sudah mulai dinilai dengan uang, namun sisi-sisi sosialnya masih tinggi, karena biasanya terdiri dari satu keluarga atau bertetangga.
4. Kelembagaan kelompok tani.
5. Kelembagaan koperasi.
6. Kelembagaan usaha pengelolaan simpan pinjam atau mikro kredit yang dikelola petani.
7. Kelembagaan perdagangan. Misalnya interaksi petani dengan pedagang, baik pedagang sarana produksi maupun hasil produksi.
8. Kelembagaan perbankan, yaitu relasi antara petani dengan perbankan komersial. Ini contoh yang paling ekstrim. Keterlambatan pengembalian pinjaman dapat ditimpakan hukuman denda dan bunga yang lebih besar, namun juga dapat berupa hukuman penjara dan penyitaan aset peminjam.

### 3.3 Pemahaman Tingkat Komunalitas Masyarakat

Pada bagian ini, harus diidentifikasi dengan jeli bagaimana tingkat individualitas yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Jika masyarakatnya sangat mandiri dan individualistis, maka aksi kolektif melalui kelembagaan dinilai tidak tepat. Sebagai contoh: jika memang petani sudah mampu membeli pupuk sendiri ke kios dengan harga dan ketersediaan yang baik, maka tidak perlu kelompok tani membeli pupuk secara kolektif. Ukuran untuk memilih adalah motivasi ekonomi.

Dalam relasi ekonomi, dua ukuran pentingnya adalah "untung" dan "efisien". Para pelaku ekonomi selalu melihat pada dua faktor itu. Pada masyarakat yang sudah sangat *economic minded*, jika berkelompok tidak menguntungkan, maka petani tidak akan mau jadi anggota kelompok. Tapi, bagi masyarakat yang tidak terlalu berhitung secara ekonomi, namun senang untuk bertemu dan bersosialisasi, walau kurang menguntungkan, maka mereka masih senang datang ke pertemuan kelompok. Setelah paham nilai-nilai ekonominya, selanjutnya perlu diduga dengan tepat, apakah di desa bersangkutan aksi kolektif akan lebih efektif atau tidak. Aksi kolektif hanya akan efektif apabila ciri komunalitasnya masih kental dalam masyarakat, di mana mereka masih senang dengan kebersamaan, guyub, saling menolong, dan lain-lain. Ini penting untuk mengetahui apakah interaksi lebih untung dan efisien secara kolektif atautkah secara

individual? Contoh: jika memang petani telah memiliki langganan pembeli sapinya dengan harga baik dan lancar, untuk apa penjualan secara berkelompok. Tabel 2 berikut dipaparkan ciri-ciri masyarakat yang masih kuat nilai-nilai kolektivitasnya atau komunalitasnya, dan yang tinggi nilai individualitasnya.

**Tabel 2.** Karakter dan Indikator Masyarakat dengan Ciri Komunalitas Tinggi dan Individualitas Tinggi.

Masyarakat bercirikan komunalitas tinggi	Masyarakat bercirikan Individualitas tinggi
1. Karakter "setting" masyarakatnya	1. Karakter "setting" masyarakatnya
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Desa cenderung tertutup, semua penduduk bekerja dalam desa</li> <li>b. Sebagian besar penduduk biasanya memiliki pekerjaan yang sama.</li> <li>c. Terdapat sumberdaya penting yang harus dikelola bersama misalnya, air irigasi sehingga ketergantungan tinggi.</li> <li>d. Biasanya tingkat perekonomian relatif seimbang atau merata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Desa sudah terbuka, banyak penduduk menggantungkan hidup di luar desa.</li> <li>b. Biasanya penduduk memiliki pekerjaan yang beragam.</li> <li>c. Tidak ada tekanan untuk bertindak kolektif, karena ketergantungan satu sama lain lemah.</li> <li>d. Biasanya ekonomi antar rumah tangga timpang.</li> </ul>
2. Indikator "visual"	2. Indikator "visual"
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pertemuan warga berjalan rutin, misalnya berupa selapanan di Jawa dan Bali.</li> <li>b. Setiap pertemuan biasanya diikuti sebagian besar warga</li> <li>c. Terdapat arisan uang atau arisan kerja (misalnya: sambat sinambat)</li> <li>d. Pimpinan desa mudah mengumpulkan warga, misalnya untuk kerja</li> <li>e. Penghormatan warga terhadap pemimpin desa (formal dan non formal) masih tinggi.</li> <li>f. Sanksi-sanksi sosial masih diakui dan ditakuti.</li> <li>g. Banyak terdapat medanmedan sosial agar warga mudah berinteraksi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pertemuan seluruh warga hampir tidak ada lagi.</li> <li>b. Jika ada pertemuan hanya diikuti sedikit warga.</li> <li>c. Arisan warga secara geografis sudah tidak berjalan. Paling mungkin hanya arisan sekerabat.</li> <li>d. Sulit mengumpulkan warga. Warga lebih senang bayar denda daripada kerja.</li> <li>e. Penghormatan rendah. Peran kepala desa dipandang tak lebih sebagai tenaga administrasi.</li> <li>f. Sanksi-sanksi sosial lemah.</li> <li>g. Medan-medan sosial Prima Tani</li> </ul>

### 3.4 Perumusan Antisipasi Kelembagaan Introduksi

Pilihan untuk kelembagaan hanya ada dua, apakah tetap berupa interaksi secara mandiri (individual), atau harus dilaksanakan secara kolektif (dalam kelembagaan). Jika yang dipilih adalah "kelembagaan", maka pilihan selanjutnya adalah: apakah harus dibentuk baru, atau cukup menggunakan yang sudah ada? Ketiga tahap di atas dapat diringkaskan ke dalam Tabel 3 yang mengungkapkan metodologis operasional perumusan opsi kelembagaan yang dibutuhkan. Untuk memudahkan, maka derajat ekonomi dalam interaksi dibagi atas 3 yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Pilihan kolektivitas dibedakan menjadi mandiri, individual, atau kolektif.

**Tabel 3.** Metodologi Penentuan Opsi Kelembagaan Berdasarkan Jenis dan Sifat Interaksi dalam Tiap Aktivitas

Kelompok Aktivitas dan Pelaku Interaksi	Ciri Ekonomi Interaksi* dan Pilihan Kolektivitas**)	Opsi Solusi Kelembagaan Introduksi
<b>1. Pemenuhan teknologi (software)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petanipemerintah</li> <li>• Petanipemerintah</li> <li>• Petani-petani</li> <li>• Petani-petani</li> <li>• Pemerintahpemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahindividual</li> <li>• Rendahkolektif</li> <li>• Rendahkolektif</li> <li>• Rendahindividual</li> <li>• Rendahkolektif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertemuan grup, dengan kontak</li> <li>• Dalam kelompok tani atau klinik</li> <li>• Dalam kelompok tani</li> <li>• (biarkan saja)</li> <li>• Koordinasi antar dinas,</li> </ul>
<b>2. Materi input usahatani</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petani</li> <li>• Petanipemerintah</li> <li>• Petanipemerintah</li> <li>• Petani-petani</li> <li>• Petani-petani</li> <li>• Petani pasar</li> <li>• Petani-pasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (mandiri)</li> <li>• Sedangindividual</li> <li>• Sedangkolektif</li> <li>• Sedangkolektif</li> <li>• Sedangindividual</li> <li>• Tinggiindividual</li> <li>• Tinggi-kolektif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (biarkan saja)</li> <li>• Langsung ke individu.</li> <li>• Koperasi atau kelompok tani.</li> <li>• Interaksi antar kelompok tani</li> <li>• (biarkan saja)</li> <li>• (biarkan saja)</li> <li>• Kelompok tani, koperasi, klinik</li> </ul>
<b>3. Permodalan usaha</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petani</li> <li>• Petani-petani</li> <li>• Petani-petani</li> <li>• Petani-pasar</li> <li>• Petani-pasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (mandiri)</li> <li>• Sedangkolektif</li> <li>• Sedangindividual</li> <li>• Tinggiindividual</li> <li>• Tinggi-kolektif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (biarkan saja)</li> <li>• Arisan, simpan pinjam,</li> <li>• (biarkan saja)</li> <li>• Perbankan, lembaga komersial</li> <li>• Kelompok tani,</li> </ul>

Kelompok Aktivitas dan Pelaku Interaksi	Ciri Ekonomi Interaksi* dan Pilihan Kolektivitas**)	Opsi Solusi Kelembagaan Introduksi
4. Pemenuhan tenaga kerja		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petani</li> <li>• Petani-petani</li> <li>• Petani-pasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (mandiri)</li> <li>• Sedangkolektif</li> <li>• Tinggiindividual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (biarkan saja)</li> <li>• Arisan kerja, sambat-sinambat</li> <li>• Buruh upahan.</li> </ul>
5. Usahatani		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petani</li> <li>• Petani-petani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (mandiri)</li> <li>• sedangkolektif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (biarkan saja)</li> <li>• Pengelolaan lahan bersama</li> <li>• kelompok tani.</li> </ul>
6. Pemasaran hasil produksi		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petani-pasar</li> <li>• Petani-pasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tinggi-kolektif</li> <li>• Tinggiindividual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelompok usaha, klinik</li> <li>• Perkuat jaringan, bantuan</li> </ul>

Keterangan:

- \*) Ciri atau motivasi ekonomi dalam interaksi dibedakan atas 3 kategori, yaitu "rendah, sedang dan tinggi".
- \*\*\*) Pilihan kolektivitas atau komunalitas ada 3, yaitu: mandiri tanpa tergantung orang lain, individual, dan kolektif (dalam organisasi).

Pada bagian berikut dipaparkan satu per satu deskripsinya untuk tiap kelompok aktivitas. Paparan ini dinilai penting untuk memberikan pengalaman praktis dalam perumusan opsi kelembagaan yang dibutuhkan pada setiap aktivitas agribisnis.

## 1. Pemenuhan Teknologi *Software*

Aliran teknologi perangkat lunak (*software*) di Prima Tani, umumnya terjadi antara pemerintah (BPTP/Balit/Puslit) dengan petani, serta antara petani dengan petani. Namun dapat juga terjadi interaksi antara lembaga pemerintah dengan pemerintah. Seluruh interaksi di sini bernilai ekonomi "rendah", artinya tidak komersial. Ada lima opsi yang dapat dipilih pada bagian ini, yaitu:

- (a) Petani-pemerintah-individual. Transfer teknologi dari pemerintah ke petani secara individual dapat dilakukan dengan menemui langsung kontak tani jika ini dipandang akan lebih efisien, atau dengan mengumpulkan petani di satu tempat, meskipun mereka tidak diikat dalam satu kelompok tani. Peluang lain adalah menggunakan kesempatan pada pertemuan warga, misalnya di selapanan, pengajian, habis sholat Jumatan, sehabis kebaktian di gereja, dan lain-lain. Pembentukan kelompok tani akan terlalu

- "mahal" jika hanya digunakan sebagai wadah komunikasi teknologi saja.
- (b) Petani-pemerintah-kolektif. Transfer dari pemerintah ke petani dalam aksi kolektif dapat menggunakan kelompok tani atau di klinik agribisnis. Pilihan ini digunakan jika kelompok tani sudah ada dan berjalan dengan baik, yang ditandai dengan masih berjalannya pertemuan secara berkala, kehadiran anggota yang tinggi dalam setiap pertemuan, dan lain-lain.
  - (c) Petani-petani-kolektif. Dalam kelompok tani yang berjalan baik, merupakan hal biasa antar petani saling berbagi pengetahuan. Namun jika kelompok tani atau klinik agribisnis belum ada, dan pelaksana Prima Tani cenderung memilih pola ini, maka langkah pertama adalah membentuk dan mendorong kelompok tani atau klinik agribisnis sehingga berjalan baik.
  - (d) Petani-petani-individual. Pola interaksi ini sangat umum terjadi. Bahkan sebagian besar kemampuan teknologi yang dimiliki petani saat ini sesungguhnya adalah melalui belajar antar petani. Jika pola ini dipandang pelaksana Prima Tani lebih efisien dan efektif (karena petani lebih percaya ke petani lain daripada ke orang luar), maka tidak perlu usaha khusus. Prima Tani dapat membantu agar komunikasi teknologi antar petani lebih cepat dan efektif, misalnya dengan mendorong berbagai pertemuan baik formal maupun non formal. Pelaksana Prima Tani juga dapat meningkatkan pengetahuan petani yang sering menjadi sumber bertanya bagi petani lain.
  - (e) Pemerintah-pemerintah-kolektif. Selain dengan petani, juga terjadi interaksi antara dua atau lebih lembaga pemerintah dalam transfer teknologi, misalnya antara BPTP dengan Balit/Puslit, atau antara BPTP dengan Dinas Pertanian setempat. Sebagaimana layaknya relasi di dunia birokrasi, maka keefektifan komunikasi dapat ditingkatkan dengan melakukan pertemuan lebih sering, baik melalui rapat, sosialisasi, komunikasi telepon, internet, dan lain-lain. Agar semua pelaku diikat secara formal, maka SK Gubernur dan Bupati, sudah cukup sebagai basis kelembagaannya. Selain itu, jangan anggap enteng hubungan personal secara non formal antara dua orang dari kantor berbeda, karena seringkali bahkan lebih efektif.

## 2. Pemenuhan Input atau Sarana Produksi

- (a) Petani-mandiri. Jika petani telah mampu memenuhi sarana produksi sendiri, misalnya pemanfaatan benih produksi sendiri atau membeli, maka biarkan saja. Tempatkan ini pada prioritas yang rendah. Kecuali, jika dipandang benih tersebut kurang bermutu baik, maka perlu upaya untuk menyediakannya.
- (b) Petani-pemerintah-individual. Dalam Prima Tani ada peluang bagi BPTP atau Dinas Pertanian setempat untuk memberikan bantuan benih secara cuma-cuma dalam jumlah terbatas. Pemberian langsung kepada individu tidak membutuhkan kelembagaan apapun, langsung saja ke individu petani bersangkutan. Meskipun menggunakan pendekatan individual, agar terkontrol penggunaannya gunakan otoritas pemimpin formal dan non formal setempat.
- (c) Petani-pemerintah-kolektif. Jika bantuan dipandang akan lebih terkontrol jika diberikan secara kolektif, maka koperasi atau kelompok tani dapat digunakan. Pemberian secara kolektif ini akan lebih terjaga penggunaannya, serta memudahkan pula jika harus dikembalikan. Selain itu, juga akan lebih adil, karena masyarakat sendiri yang mendistribusikannya. Pola ini dipilih jika kelembagaan untuk menyalurkannya sudah eksis dan berjalan baik.
- (d) Petani-petani-kolektif. Upaya pemenuhan sarana produksi secara kolektif, misalnya saling meminjamkan benih dan alat pertanian antar kelompok tani, maka Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) dapat menjadi pilihan yang tepat. Dalam hal ini, harus jeli untuk menilai sifat kolektifitas yang dimiliki masyarakat setempat, meskipun ini bukan merupakan upaya yang sangat komersial.
- (e) Petani-petani-individual. Saling bantu meminjamkan benih antar tetangga misalnya, merupakan fenomena yang umum di kalangan petani. Jika pola ini masih umum dijumpai, dan tampaknya masih efektif, maka tak perlu dibuatkan kelembagaan apapun. Biarkan saja berjalan sendiri.
- (f) Petani-pasar-individual. Pola ini sesungguhnya paling banyak ditemukan, di mana petani membeli sendiri seluruh kebutuhan saprodinya. Jika memang petani mampu secara ekonomi, dan saprodi juga telah tersedia dengan harga yang pantas, maka tidak perlu upaya khusus dari pelaksana Prima Tani.

- (g) Petani-pasar-kolektif. Agar petani dapat mengakses saprodi dengan harga yang lebih murah, maka penyediaan sarana produksi dapat dilakukan secara kolektif melalui kelompok tani, koperasi, atau disediakan di Klinik Agribisnis.

Kelompok tani harus mampu memperoleh saprodi dengan memotong rantai penyediaannya, sehingga diperoleh harga yang lebih murah. BPTP dan Dinas Pertanian dapat mencarikan informasi dan mengenalkan dengan pelaku pasarnya, misalnya langsung berhubungan dengan PT. Sang Hyang Sri untuk benih padi.

### 3. Pemenuhan Permodalan Usaha

- (a) Petani-mandiri. Jika petani mampu memenuhi modal usaha sendiri, maka biarkan saja.
- (b) Petani-petani-kolektif. Pemenuhan modal antarpetani secara kolektif dapat menggunakan lembaga arisan, simpan pinjam, maupun lembaga kredit mikro lain. Pahami dengan baik bagaimana peluang ini bisa diaplikasikan. Kuncinya adalah, apakah masyarakatnya masih memiliki sifat-sifat komunalitas yang tinggi atau tidak? Jika masyarakatnya sudah individualistik, lembaga simpan pinjam yang dikelola secara kekeluargaan sulit berjalan.
- (c) Petani-petani-individual. Jika petani telah mampu memenuhi permodalannya melalui saling bantu atau saling pinjam dengan tetangga atau kerabat, maka ini kurang perlu untuk ditangani.
- (d) Petani-pasar-individual. Jika petani telah mampu mengakses lembaga keuangan secara mandiri, maka dorong untuk berhubungan langsung dengan perbankan. Hambatan yang sering terjadi adalah sulitnya memenuhi persyaratan perbankan, misalnya ketiadaan sertifikat tanah sebagai jaminan. Untuk itu, pelaksana Prima Tani dapat mendorong perbankan misalnya untuk mencoba menggunakan bentuk-bentuk jaminan lain. Analisis usaha yang menguntungkan dan dibuat secara informatif dapat pula menjadi salah satu jaminan pinjaman.
- (e) Petani-pasar-kolektif. Jika petani telah mampu secara ekonomi berhubungan dengan perbankan komersial, namun kendalanya adalah administrasi, maka kelompok tani atau koperasi dapat sebagai perantara untuk mendapatkan

pinjaman dari bank. Koperasi bertindak sebagai lembaga yang meminjam dengan jaminan berupa aset milik koperasi sendiri.

#### 4. Pemenuhan Tenaga Kerja

- (a) Petani-mandiri. Jika petani cukup dengan hanya mengandalkan tenaga kerja dari keluarga sendiri, berarti tidak dibutuhkan kelembagaan tenaga kerja yang khusus.
- (b) Petani-petani kolektif. Pada masyarakat yang sifat keguyubannya masih kental, biasanya berjalan kelembagaan arisan kerja berupa *sambat sinambat*. Arisan kerja merupakan kelembagaan pemenuhan tenaga kerja yang tidak terlalu komersial, meskipun kehadiran anggota dihitung dan ada denda jika tidak hadir bekerja.
- (c) Petani-pasar-individual. Jika di desa bersangkutan petani sudah menggunakan buruh upahan dan itu merupakan pola yang baik, maka dapat dikembangkan pemenuhan tenaga kerja upahan secara komersial. Jangan berpikir untuk membuat kelompok *sambat-sinambat* pada kondisi seperti ini.

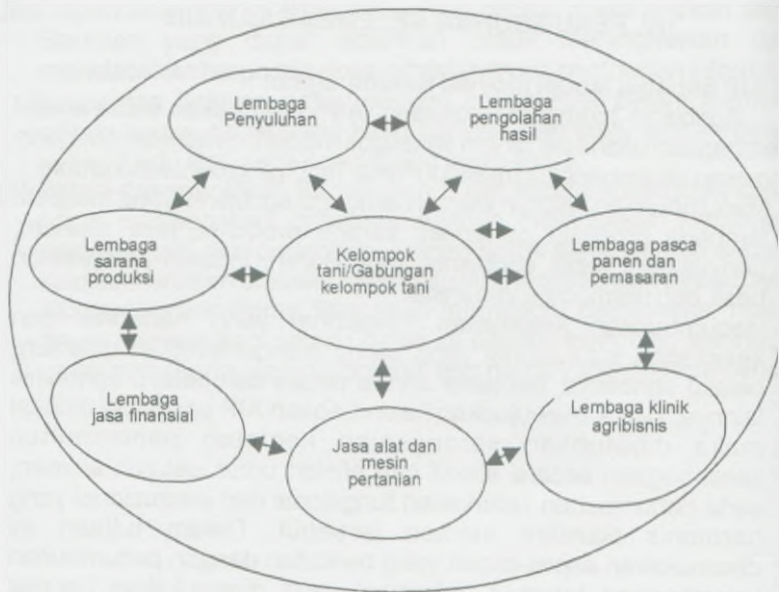
#### 5. Usahatani

- (a) Petani-mandiri. Jika sebagian besar petani sudah mampu menjalankan usahataniya sendiri, maka tidak dibutuhkan kelembagaan khusus.
- (b) Petani-petani kolektif. Jika ada peluang untuk mengelola usahatani secara kolektif karena itu akan lebih efisien dan menguntungkan, maka pengelolaan lahan secara bersama dalam kelompok tani dapat diintroduksikan. Misalnya berupa pengelolaan "kandang komunal" dalam usaha peternakan.

#### 6. Pemasaran Hasil Produksi

Aktivitas pemasaran, yaitu antara petani dengan pedagang, merupakan interaksi yang sangat bersifat ekonomi dibandingkan kegiatan-kegiatan lain. Persoalan ini seringkali menjadi kendala yang lebih rumit untuk dipecahkan. Hanya ada dua opsi di sini, yaitu :

- (a) Petani-pasar-individual. Pada sebagian besar wilayah dan pada banyak jenis komoditas pertanian, umumnya pemasaran hasil merupakan keputusan individual petani dan dilakukannya sendiri.



Gambar 1. Jaringan Kelembagaan Agribisnis Industrial Pedesaan (AIP)

## 2. Penumbuhan Elemen Kelembagaan AIP

### Lembaga Produksi

Lembaga produksi merupakan elemen kelembagaan AIP yang dibentuk untuk meningkatkan efisiensi produksi pertanian melalui pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan secara kolektif. Lembaga ini dapat berbentuk Kelompok Tani (K) ataupun Gabungan Kelompok Tani. Apakah pembentukan K menggunakan pendekatan domisili petani atau hamparan lahan hal itu disesuaikan dengan kebutuhan. Yang perlu mendapat perhatian dalam pembentukan KT adalah bahwa aktivitas masing-masing individu petani dapat dikoordinir untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain, aktivitas setiap individu petani dilaksanakan berdasarkan keputusan kolektif anggota K. Aktivitas yang dimaksud meliputi seluruh kegiatan usahatani.

mulai dari perencanaan kebutuhan sarana produksi, penyelenggaraan usahatani, pasca panen hingga pemasaran hasil.

### **Lembaga Sarana Produksi**

Tujuan utama pengembangan lembaga ini adalah menyelenggarakan kegiatan pengadaan sarana produksi dalam jenis, kuantitas, kualitas, waktu, tempat, dan harga sesuai kebutuhan dan kemampuan petani dan pelaku agribisnis lainnya. Penumbuhan kelembagaan tersebut dapat ditempuh dengan mengkoordinasikan aktivitas pedagang sarana produksi dengan kebutuhan petani yang tergabung dalam KT.

### **Lembaga Penyuluhan**

Akhir-akhir ini posisi penyuluh sangat bervariasi di setiap daerah, dan umumnya eksistensi fungsi mereka dalam pengembangan agribisnis mengalami penurunan yang sangat besar. Penumbuhan lembaga penyuluhan terutama ditujukan untuk memfungsikan kembali secara efektif peranan para penyuluh dalam melakukan kegiatan pendampingan pada petani. Bentuk organisasi penyuluh yang dikembangkan dapat bervariasi di setiap lokasi, dengan tujuan utama memanfaatkan sumberdaya pertanian setempat secara optimal.

### **Lembaga Klinik Agribisnis**

Pembentukan lembaga ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan informasi teknologi pertanian, informasi pasar dan informasi permodalan. Lembaga ini merupakan organisasi dengan anggota para penyuluh, peneliti BPTP dan petugas dinas terkait. Klinik agribisnis didukung pula oleh Puslit dan Balit di lingkup Deptan yang berperan sebagai pemasok inovasi pertanian. Dalam operasionalnya lembaga ini dapat melibatkan swasta, produsen hasil pertanian, serta sarana produksi pertanian.

### **Lembaga Pasca Panen/Pemasaran Hasil Pertanian**

Penumbuhan lembaga ini ditujukan untuk menekan kehilangan hasil panen atau bahan mentah pertanian, meningkatkan nilai tambah produk, dan memperlancar

pemasaran hasil pertanian sesuai dengan kebutuhan pasar. Fungsi lembaga ini sangat penting dan sejauh mungkin bisa dikuasai organisasi atau kelompok tani. Hingga sekarang umumnya lembaga ini belum bisa dikuasai petani atau kelompok tani. Lembaga ini dapat merupakan bentukan baru yang dikelola oleh KT atau merupakan hasil pengembangan lebih lanjut terhadap lembaga yang sudah ada. Dalam pengembangan tersebut kegiatan lembaga pasca panen/pemasaran antara lain perlu diarahkan untuk meningkatkan posisi tawar petani.

### **Lembaga Jasa Alsintan**

Penumbuhan lembaga jasa alsintan dapat dirintis dengan membentuk organisasi tani yang mengkhususkan kegiatannya pada usaha pelayanan jasa penyewaan alsintan. Usaha tersebut harus dapat memberikan pelayanan jasa yang memadai kepada petani dan pelaku agribisnis lainnya. Hal yang juga penting untuk diperhatikan bahwa dalam menjalankan fungsinya lembaga ini harus dapat memperoleh keuntungan yang layak dan berkesinambungan. Jika lembaga dengan jenis usaha tersebut sudah ada, maka lembaga tersebut dikembangkan dan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi usaha dan meningkatkan pelayanannya kepada petani dengan biaya relatif terjangkau. Dalam kaitan ini sistem insentif nampaknya perlu dikembangkan, misalnya dengan membantu pelaku usaha jasa alsintan untuk memperoleh kredit murah.

### **Lembaga Pengolahan Hasil Pertanian**

Penumbuhan lembaga pengolahan hasil dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan memperluas pasar produk. Penumbuhan lembaga ini dapat dirintis dengan membentuk industri pengolahan skala kecil dan rumah tangga yang dikelola secara berkelompok. Untuk menjamin kesinambungan lembaga tersebut maka usaha pengolahan yang dikembangkan harus didukung dengan pembinaan teknis dan manajemen agar dapat memberikan keuntungan yang layak. Pengembangan industri pengolahan yang sudah ada juga dapat ditempuh dan diarahkan untuk menciptakan pembagian nilai tambah secara proporsional dengan petani pemasok bahan baku atau pelaku agribisnis lain.

pedesaan.

### **Lembaga Permodalan**

Lembaga permodalan (finansial) yang ditumbuhkan dapat merupakan bentuk baru atau memanfaatkan lembaga yang sudah ada tetapi belum menjangkau petani dan pelaku agribisnis lain. Penumbuhan lembaga permodalan baru dapat dirintis dengan mengembangkan pola Kredit Usaha Mandiri (KUM) yang melibatkan anggota Kelompok Tani (KT). Sedangkan pemanfaatan lembaga permodalan yang sudah ada lebih diarahkan untuk membuka berbagai hambatan penyaluran kredit kepada petani anggota KT dan pelaku agribisnis lainnya. Dalam kaitan ini peranan Pemda sebagai kekuatan politik dapat dilibatkan secara intensif.

### **4.3 Keterkaitan Antar Elemen Kelembagaan AIP**

Keterkaitan antar elemen AIP di lapangan perlu ditumbuhkan melalui upaya khusus. Paling tidak ada tiga aspek yang dibutuhkan, yaitu :

1. Penumbuhan keterkaitan fungsional antar elemen kelembagaan AIP.

Pengertiannya bahwa setiap elemen kelembagaan AIP tidak hanya harus berfungsi, namun antar elemen harus memiliki keterkaitan hubungan fungsional. Sebagai gambaran, di suatu tempat bisa ditumbuhkan elemen lembaga permodalan dan penyuluhan. Jika kedua elemen tadi tidak berfungsi mendukung lembaga produksi, maka dapat dikatakan bahwa keduanya tidak memiliki keterkaitan fungsional. Setelah semua elemen kelembagaan AIP berhasil ditumbuhkan, seluruh elemen tersebut harus memiliki keterkaitan fungsional. Penumbuhan elemen lembaga pengolahan, pemasaran dan permodalan yang memiliki keterkaitan fungsional yang kuat dengan lembaga produksi, merupakan justifikasi dibangunnya keterkaitan fungsional antar elemen. Penumbuhan keterkaitan fungsional ditempuh melalui temu kelembagaan AIP, yang diprakarsai oleh pengelola laboratorium agribisnis, bekerja sama dengan pemda dan kelompok tani atau gabungan kelompok tani. Dalam forum ini dibicarakan pentingnya membangun keterkaitan fungsional antar masing-masing elemen kelembagaan AIP.

## 2. Penumbuhan keterkaitan institusional antar elemen kelembagaan AIP.

Tumbuh dan terbentuknya keterkaitan fungsional antar elemen kelembagaan AIP dinilai belum mencukupi, karena masing-masing elemen bisa jadi hanya berorientasi untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Jika hal ini terjadi, maka keterkaitan fungsional antar elemen diperkirakan akan rentan terhadap dinamika pasar dan aksi sepihak satu atau lebih elemen kelembagaan AIP yang kontra produktif. Oleh sebab itu, keterkaitan fungsional antar kelembagaan AIP harus ditempatkan dalam bingkai hubungan keterkaitan institusional. Dalam kaitan ini, keterkaitan antar elemen kelembagaan AIP harus tercermin dalam hubungan *sharing system* yang adil berdasar kesepakatan bersama.

Upaya menumbuhkan keterkaitan institusional perlu dilihat sebagai kelanjutan dari penumbuhan keterkaitan fungsional antar elemen kelembagaan AIP. Oleh sebab itu, upaya menumbuhkannya perlu diawali dengan mempertemukan seluruh elemen dalam forum temu kelembagaan AIP. BPTP bersama-sama dengan aparat pemda dan tokoh masyarakat pada tahap awal diharapkan memprakarsai upaya ini, dan diharapkan dapat disepakati hubungan *sharing system* (mencakup cara pembagian kerja dan bagi hasil) yang didasarkan atas semangat saling menghormati (*mutual respect*), saling percaya (*mutual trust*), dan saling menguntungkan (*mutual benefit*). Kesepakatan ini bisa dijadikan pedoman kerja bersama dalam kurun waktu tertentu.

## 3. Pembuatan aturan main bersama antar elemen kelembagaan AIP.

Aturan main berfungsi sebagai panduan bersama antar elemen ke elemen kelembagaan AIP ataupun panduan intern antar anggota dalam satu kelembagaan AIP. Dalam aturan main dirumuskan juga sanksi jika ada pelanggaran terhadap panduan yang telah disepakati bersama, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban masing-masing elemen dan juga masing-masing anggota dalam satu elemen. Mengingat aturan main adalah panduan bersama, maka harus dibuat bersama oleh semua anggota dalam satu elemen kelembagaan AIP. Aturan main antar elemen kelembagaan AIP dibuat oleh perwakilan dari masing-masing AIP, dengan melibatkan aparat BPTP, pemda, pakar lokal dan tokoh masyarakat. Aturan main tidak bisa dibuat sekali jadi, tapi membutuhkan proses modifikasi dari waktu ke waktu.

Hal ini perlu dilakukan agar aturan main memiliki kesesuaian dengan perkembangan mental anggota yang terlibat dalam elemen AIP, perubahan iklim usaha, kebijakan pemda, dan aspek sosio-ekonomi-budaya yang belum diperhitungkan sebelumnya. Aturan main yang perlu dibuat secara khusus adalah yang menyangkut: (1) pembagian resiko, (2) penentuan harga, (3) sistem pembayaran, (4) cara transaksi, (5) sistem pemilihan usaha, dan (6) cara memperoleh modal dan penentuan harga modal. Aturan main dibuat agar permasalahan antar anggota atau antar elemen kelembagaan AIP bisa diselesaikan secara kelembagaan.

#### 4.4 Tolok Ukur Keberhasilan

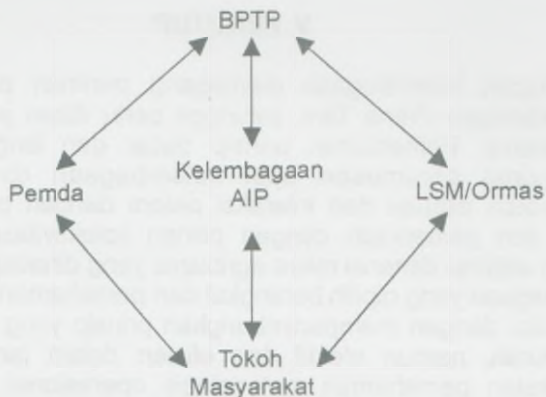
Keberhasilan penumbuhan kelembagaan AIP harus bisa dirasakan oleh masyarakat dan sekaligus diukur secara obyektif. Beberapa indikatornya adalah:

1. Berdasarkan lengkap tidaknya elemen kelembagaan AIP yang terbentuk, misalnya:
  - Sama sekali belum lengkap: belum ada satupun elemen kelembagaan AIP yang terbentuk.
  - Belum lengkap: sudah terbentuk satu elemen kelembagaan AIP atau lebih, namun belum semua elemen kelembagaan AIP terbentuk.
  - Sudah lengkap: semua elemen kelembagaan AIP sudah terbentuk.
2. Diukur dari sudah atau belum berfungsinya elemen kelembagaan AIP yang terbentuk, misalnya: Sama sekali belum berfungsi: elemen kelembagaan AIP sudah terbentuk namun belum berfungsi.
  - Sudah berfungsi sebagian: satu atau lebih elemen kelembagaan AIP telah berfungsi, namun belum semuanya berfungsi.
  - Sudah berfungsi sepenuhnya tapi belum terintegrasi: semua elemen AIP telah berfungsi, namun belum sepenuhnya memiliki keterkaitan fungsional.
  - Sudah berfungsi sepenuhnya dan sudah terintegrasi: semua elemen kelembagaan AIP telah berfungsi, dan antar elemen kelembagaan AIP sudah memiliki keterkaitan fungsional.

3. Diukur dari sudah terjalin atau belumnya keterkaitan institusional antar elemen kelembagaan AIP, misalnya:
  - Keterkaitan institusional sama sekali belum terbentuk: keterkaitan antar elemen kelembagaan AIP sudah terbentuk, namun keterkaitan institusionalnya sama sekali belum terbentuk.
  - Keterkaitan institusional sudah terbentuk sebagian: keterkaitan antar elemen kelembagaan AIP sudah terbentuk, namun keterkaitan institusional yang terbentuk baru dua atau tiga elemen kelembagaan AIP.
  - Keterkaitan institusional sudah sepenuhnya terbentuk: keterkaitan antar elemen kelembagaan AIP sudah terbentuk, dan keterkaitan institusionalnya secara keseluruhan juga sudah terbentuk.
  
4. Diukur dari aspek perkembangan kewirausahaan setempat, misalnya:
  - Kewirausahaan sama sekali belum bisa ditumbuhkan: tidak satupun elemen kelembagaan AIP yang mampu meningkatkan efisiensinya secara ekonomi.
  - Kewirausahaan sudah tumbuh, namun belum optimal: satu atau lebih elemen AIP mampu meningkatkan efisiensi ekonomi, namun secara keseluruhan kelembagaan AIP belum mampu meningkatkan efisiensi ekonominya.
  - Kewirausahaan sudah optimal: seluruh atau sebagian besar elemen AIP mampu meningkatkan efisiensi ekonomi, dan secara keseluruhan kelembagaan AIP secara progresif juga telah mampu meningkatkan efisiensi ekonominya.

#### **4.5 Organisasi Pendampingan**

Upaya penumbuhan kelembagaan AIP merupakan bagian dari sistem inovasi kelembagaan. Kelembagaan AIP akan sulit berkembang dengan sendirinya tanpa dipicu, dibantu atau dikawal dengan cara atau oleh lembaga khusus. Untuk mempercepat dan mempertajam pencapaian terbentuknya kelembagaan AIP diperlukan bantuan dari luar berupa organisasi pendampingan. Secara ringkas organisasi pendampingan dapat ditunjukkan pada Gambar 2 di bawah ini.



**Gambar 2.** Struktur Keorganisasian Pendampingan Penumbuhan Kelembagaan AIP.

Tampak bahwa organisasi pendampingan merupakan representasi dari masyarakat madani. Penumbuhan kelembagaan AIP merupakan bagian integral dari masyarakat madani. Kelembagaan AIP akan sulit ditumbuhkan jika sistem masyarakat madani yang melingkupinya belum tumbuh sehat. Oleh sebab itu peran BPTP secara sosio-budaya mencakup juga bagian dari pemrakarsa penumbuhan dan pengembangan masyarakat madani di wilayah pengembangan Prima Tani. Dalam kaitan ini BPTP perlu berinisiatif untuk menggalang kerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengawali pembentukan Organisasi Pendampingan Prima Tani di wilayah setempat.

## V. PENUTUP

Aspek kelembagaan memegang peranan penting dalam pengembangan Prima Tani, sehingga perlu diberi perhatian yang proporsional. Pemahaman prinsip dasar dan langkah strategis operasional perumusan opsi kelembagaan dinilai penting. Pendekatan dimulai dari interaksi petani dengan petani lainnya, pasar, dan pemerintah dengan pilihan kolektivitasnya berkaitan dengan aktifitas dimensi mikro agribisnis yang dihadapi petani. Opsi kelembagaan yang dipilih berangkat dari pemahaman kelembagaan yang ada, dengan mempertimbangkan prinsip yang paling mudah dan murah, namun efektif dan efisien dalam jangka panjang. Pendekatan pemahaman metodologis operasional yang bersifat mikro dan riil dalam ekonomi agribisnis rumah tangga petani ini akan lebih memudahkan memahami aspek kelembagaan berkaitan dengan penumbuhan agribisnis industrial pedesaan (AIP). Dalam konteks ini tidak hanya dilihat pengembangan elemen kelembagaan dan keterkaitan fungsionalnya, tetapi juga keterkaitan institusional antar elemen dalam AIP. Keberhasilan penumbuhan AIP sebagai suatu model kelembagaan usaha pertanian atau model inovasi kelembagaan agribisnis merupakan representasi dari pencapaian sasaran pengembangan Prima Tani. Peneliti dan penyuluh di BPTP yang sudah terbiasa dengan penelitian pengembangan diyakini tidak akan mengalami hambatan dalam pemahaman langkah strategis perumusan inovasi kelembagaan agribisnis ini. Melalui kerjasama secara partisipatif dengan Pemda, dinas terkait, pelaku agribisnis, dan tokoh kunci di pedesaan diyakini perumusan dan implementasi inovasi kelembagaan ini akan menjadi lebih ringan. Berbagai pihak di lapangan sudah terbiasa mengimplementasikan program pembangunan pertanian dengan melibatkan berbagai pihak. Pemahaman metodologi operasional ini diharapkan dapat membantu keberhasilan inovasi kelembagaan dalam menghela inovasi teknologi melalui pengembangan Prima Tani di lapangan.

